



TANGGUNG PESERTA BPJS DIBIYAI PEMERINTAH

Yogya Anggarkan Rp 24 Miliar

UMBULHARJO (MERAPI) - Meskipun kepesertaan BPJS kesehatan di Kota Yogyakarta sudah masuk *universal health coverage* masih ada belasan ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu Pemkot Yogyakarta akan menanggung premi BPJS Kesehatan sebagai Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD).

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Agus Sudrajat mengutarakan, Pemkot Yogyakarta sudah mengalokasikan sekitar Rp 24,8 miliar dalam APBD 2019 untuk pembayaran premi atau PDPD BPJS Kesehatan bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk pendataan peserta BPJS Kesehatan dengan premi akan ditanggung APBD Kota Yogyakarta masih menunggu surat edaran walikota.

"Waktu pendataannya kami tunggu surat edaran walikota dulu. Saat ini sudah ada warga yang kece mau mendaftar karena beredar pesan berantai terkait pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kota Yogyakarta," kata Agus dalam jumpa pers di Balai Kota, Kamis (22/11).

Menurutnya, warga yang bisa menjadi PDPD BPJS

Kesehatan selain belum memiliki jaminan kesehatan adalah warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP maupun kartu identitas anak. Belum terdapat sebagai peserta jaminan kesehatan pemerintah pusat serta bersedia berobat di puskesmas Kota Yogyakarta dan rumah sakit di Yogyakarta kelas 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Program akan gugur jaminannya jika peserta meninggal dunia, pindah penduduk, minta naik layanan naik kelas dari kelas tiga karena itu tandanya mampu," ujarnya.

Selain itu bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 1 dan 2 yang menunggak pembayaran premi selama 1 tahun juga bisa mendaftar. Untuk peserta kelas 1 dan 2 yang menunggak kurang dari setahun, harus atas permintaan sendiri ingin menjadi peserta program itu. Syarat membawa KK, KTP, KIA yang asli dan fotokopi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk tidak naik kelas pelayanan. Ditegaskan pendataan PDPD BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005